

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI KABUPATEN ACEH BARAT

2014



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN ACEH BARAT

<http://acehbaratkab.bps.go.id>



**INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI (IKK)
KABUPATEN ACEH BARAT
2014**

<http://acehbaratkab.bps.go.id>
<http://acehbaratkab.bps.go.id>

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI (IKK) KABUPATEN ACEH BARAT 2014

Katalog BPS : 7102025.1107
Ukuran Buku : 18,2 x 25,7 cm
Jumlah Halaman : xiv + 58 halaman

Naskah:

Seksi Statistik Distribusi BPS Kabupaten Aceh Barat

Gambar Kulit:

Seksi Statistik Distribusi BPS Kabupaten Aceh Barat

Diterbitkan Oleh:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Dalam upaya mendukung keberhasilan pembangunan nasional, Pemerintah menempuh kebijakan Otonomi Daerah yang mendayagunakan potensi keuangan daerahnya sendiri serta sumber keuangan lain seperti Dana Alokasi Umum (DAU). Agar pembagian DAU ke daerah kabupaten/kota menjadi adil, proporsional dan merata, diperlukan dukungan data dasar yang valid, akurat dan terkini. Kebutuhan fiskal yang dianggarkan melalui DAU dihitung berdasarkan beberapa komponen, salah satunya adalah Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).

Tujuan terbitnya publikasi Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Aceh Barat 2014 sebagai perencanaan pembangunan bagi pemerintah daerah. Data yang disajikan adalah: data IKK, Keuangan Daerah, Indeks Pembangunan Manusia dan Potensi Ekonomi Kabupaten Aceh Barat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan dan penerbitan publikasi ini. Kritik dan saran konstruktif berbagai pihak kami harapkan untuk penyempurnaan penerbitan mendatang. Semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi instansi/dinas pemerintah, swasta, kalangan akademisi maupun masyarakat luas.

Meulaboh, Agustus 2015
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Aceh Barat

Dara Dian, SE
NIP. 19680218 199212 2 001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Kegunaan	9
BAB 2. METODOLOGI	11
2.1. Ruang Lingkup	13
2.2. Perbedaan dengan IKK 2013	14
2.3. Metode Penghitungan	15
2.3.1. Penghitungan IKK 2014.....	15
2.3.2. Penghitungan Diagram Timbang IKK 2014.....	16
2.4. Kegiatan Pengumpulan Data	25
2.5. Kuesioner yang Digunakan.....	26
2.6. Konsep Definisi.....	26
BAB 3. Statistik IKK	31
3.1. Luas Wilayah.....	33
3.2. Penduduk Pertengahan 2014.....	34
3.3. Keuangan Daerah	35
3.4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita 2013	36
3.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2013.....	39

	Hal
3.6 Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Aceh Barat Tahun 2014	40
3.7. Perbandingan IKK Kabupaten Aceh Barat dengan Kabupaten/Kota Lain.....	41
 BAB 4. PENUTUP	 45
4.1. Kesimpulan	47
 LAMPIRAN	 49

http://acehbaratkab.bps.go.id

http://acehbaratkab.bps.go.id

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Beberapa Kemungkinan Penghitungan Celah Fiskal dan Dana Alokasi Umum	9
Tabel 2. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013	35
Tabel 3. Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Ekonomi Tahun 2012 - 2013.....	37
Tabel 4. Nilai Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh Tahun 2014.....	41

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. Komponen Dana Alokasi Umum Berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 2004.....	4
Gambar 2. Tahapan Formulasi Dana Alokasi Umum	8
Gambar 3. Kategori Sektor Industri	16
Gambar 4. Hubungan antara Proyek, Sistem dan Komponen.....	22
Gambar 5. Peta Wilayah Kabupaten Aceh Barat.....	33
Gambar 6. Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Barat Tahun 2014.....	34
Gambar 7. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2013 (Juta Rupiah).	38
Gambar 8. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011-2013	39
Gambar 9. Nilai Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) kabupaten/kota di Provinsi Aceh Tahun 2014	43

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran 1. Komoditi Barang Konstruksi Penghitungan IKK 2014 di Kabupaten Aceh Barat.....	51
Lampiran 2. Nilai Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Provinsi di Indonesia Tahun 2014.....	58

BAB 1

PENDAHULUAN

<http://acehbarokab.bps.go.id>

<http://acehbarokab.go.id>

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam upaya mendukung keberhasilan pembangunan nasional Indonesia, dewasa ini pemerintah menempuh kebijakan Otonomi Daerah. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mengatasi masalah ketimpangan antar daerah melalui pemerataan keuangan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, sebagian besar urusan Pemerintahan Pusat diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dengan demikian, kedudukan pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi sangat strategis. Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Sejak diberlakukannya Otonomi Daerah pada 1 Januari 2001, Pemerintah Daerah dapat mendayagunakan potensi keuangan daerahnya sendiri serta sumber keuangan lain seperti perimbangan keuangan pusat dan daerah yang berupa Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Selama beberapa tahun terakhir, DAU merupakan sumber pendapatan utama pemerintah daerah, begitu juga untuk Kabupaten Aceh Barat.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

DAU bersifat *Block Grant* yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Azas kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) yang mendasari penghitungan DAU memerlukan dukungan data yang valid, akurat dan terkini sehingga pembagian DAU ke daerah menjadi adil, proporsional dan merata. Komponen Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan Undang-Undang

Nomor 33 tahun 2004 terdiri dari dua komponen yaitu Alokasi Dasar (AD) dan Celah Fiskal (CF) dan dapat dirumuskan sebagai berikut:

Rumus Formula DAU

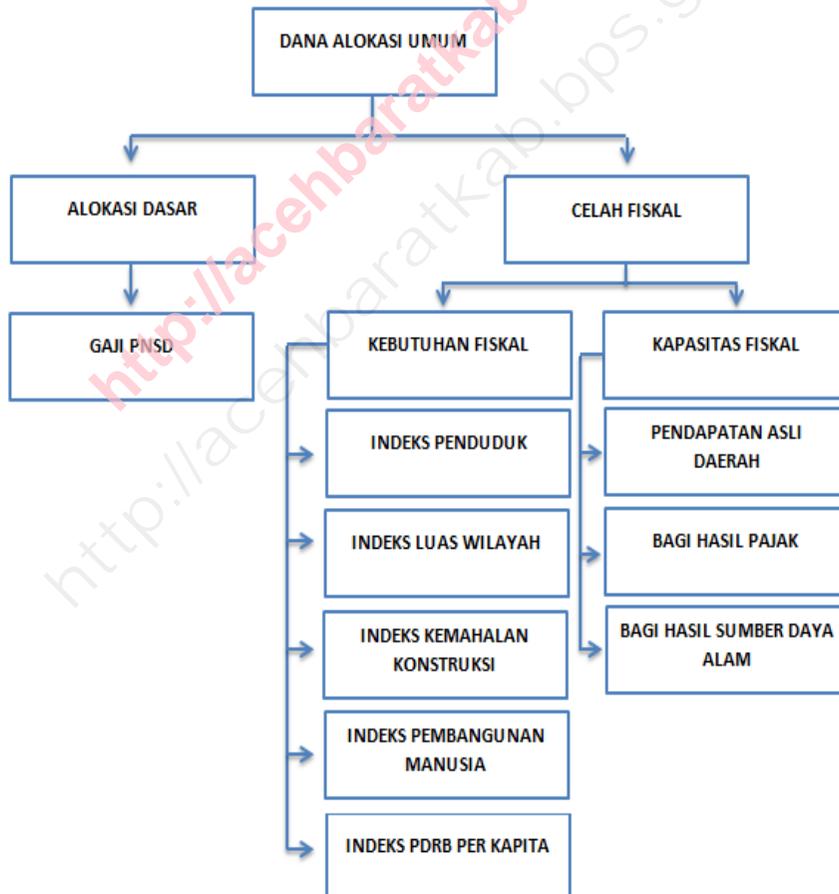
$$\text{DAU} = \text{Alokasi Dasar (AD)} + \text{Celah Fiskal (CF)}$$

dimana :

AD = Gaji PNS Daerah

CF = Kebutuhan Fiskal - Kapasitas Fiskal

Gambar 1. Komponen Dana Alokasi Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004



Alokasi Dasar

Pada pasal 27 ayat 4 disebutkan bahwa Alokasi Dasar (AD) dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah. Penghitungan Alokasi Dasar berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2005 didasarkan atas :

- Realisasi Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- Kenaikan gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan PPh pasal 21 dengan rata-rata 15%;
- Kenaikan Tunjangan Jabatan Fungsional dan Struktural;
- Tingkat Pertumbuhan (*Accres*) 2,5%;
- Gaji Bulan ke-13; dan
- Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pada UNDANG-UNDANG Nomor 33 tahun 2004, komponen belanja hanya belanja pegawai sipil daerah. Komponen belanja pegawai untuk masing-masing daerah (misal daerah A) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Alokasi DAU dari komponen belanja pegawai daerah A} = \frac{\text{belanja pegawai daerah A}}{\text{total belanja pegawai seluruh daerah}} \times \text{Total alokasi DAU dari komponen belanja pegawai}$$

Celah Fiskal (CF)

Celah fiskal merupakan selisih dari **kebutuhan fiskal** dan **kapasitas/potensi fiskal** daerah tersebut.

Kebutuhan Fiskal

Kebutuhan fiskal daerah secara umum mengindikasikan perkiraan besarnya kebutuhan anggaran yang diperlukan oleh daerah dalam

memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang diukur dengan variabel-variabel berikut :

1. Jumlah Penduduk;
2. Luas Wilayah;
3. Indeks Pembangunan Manusia;
4. Indeks Produk Domestik Regional Bruto per kapita; dan
5. Indeks Kemahalan Konstruksi.

Sehubungan dengan tugas dan fungsi Badan Pusat Statistik (BPS) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik, maka dalam hal ini Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan penyedia data untuk empat komponen (kecuali luas wilayah) dari lima komponen kebutuhan fiskal tersebut.

Jumlah penduduk mencerminkan tingkat kepadatan suatu wilayah dan menjadi penimbang bagi pemerintah dalam menjalankan program-program pembangunan. Konsep penduduk yang dimaksud adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

IPM merupakan indeks yang mengukur pencapaian pembangunan suatu wilayah yang direpresentasikan dalam tiga dimensi yaitu usia hidup (*longevity*) atau kesehatan, pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*decent living standards*).

PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan dari seluruh sektor ekonomi pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Besarnya nilai PDRB pada masing-masing sektor ekonomi menggambarkan sejauh mana ketergantungan suatu daerah terhadap salah satu sektor ekonomi. Selain itu, PDRB juga dapat digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan suatu daerah dalam kurun waktu tertentu yang dapat dilihat berdasarkan besarnya angka pertumbuhan ekonomi.

IKK adalah indeks yang menggambarkan perbandingan Tingkat Kemahalan Konstruksi/Harga Bangunan (TKK) suatu kabupaten/kota atau provinsi dengan TKK rata-rata nasional. IKK dapat mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu daerah dalam rangka melaksanakan pembangunan

infrastruktur, dimana semakin sulit letak geografis suatu daerah maka harga bahan bangunan di daerah tersebut semakin tinggi. Perbedaan kondisi geografis dan jarak antar daerah menyebabkan terjadinya perbedaan pembiayaan dalam pembangunan tersebut. Hal inilah yang menjadi dasar digunakannya Indeks Kemahalan Konstruksi untuk penyesuaian kebutuhan daerah dilihat dari sektor bangunan/konstruksi.

Mengingat pentingnya ketersediaan data komponen penentu besarnya nilai DAU yang valid dan mutakhir, menjadi sangat krusial bagi setiap daerah termasuk Kabupaten Aceh Barat untuk dapat menyajikan data keempat komponen tersebut, salah satunya adalah Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Aceh Barat tahun 2014.

Kapasitas Fiskal

Kapasitas fiskal merupakan sumber pendanaan daerah yang mencerminkan kemampuan daerah dalam memberikan pelayanan, berasal dari:

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak; dan
3. Dana Bagi Hasil (DBH) SDA.

Pengalokasian DAU berdasarkan formula dapat dirumuskan sebagai berikut:

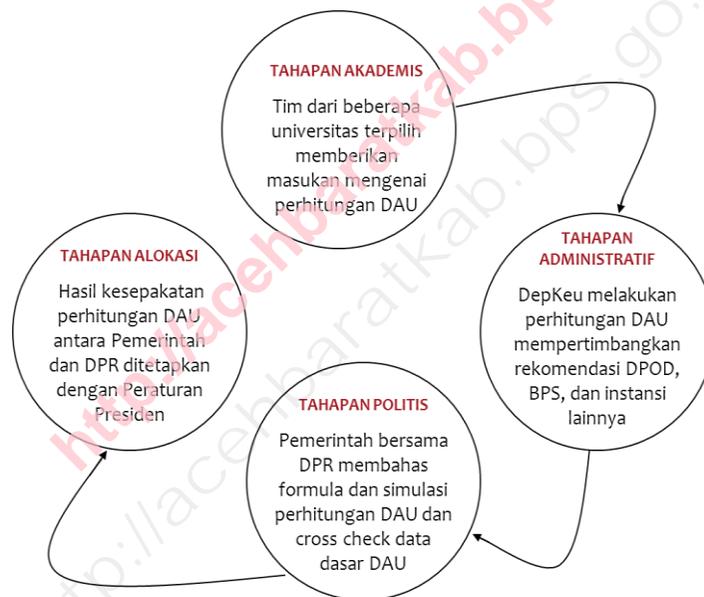
$$\begin{aligned} \text{CF} &= \text{Kebutuhan Fiskal (K}_{bf}) - \text{Kapasitas Fiskal (K}_{pf}) \\ \text{K}_{bf} &= \text{TBR } (\alpha_1 \text{IP} + \alpha_2 \text{IW} + \alpha_3 \text{IPM} + \alpha_4 \text{IKK} + \alpha_5 \text{IPDRB/kapita}) \\ \text{K}_{pf} &= \text{PAD} + \text{DBH Pajak} + \text{DBH SDA} \end{aligned}$$

dimana:

- | | | |
|-----------------|---|---|
| CF | = | Celah Fiskal |
| K _{bf} | = | Kebutuhan Fiskal |
| TBR | = | Total Belanja Rata-Rata APBD (Realisasi 2013) |
| IP | = | Indeks Jumlah Penduduk (Pertengahan Tahun 2014) |

- IW = Indeks Luas Wilayah
 IPM = Indeks Pembangunan Manusia (Tahun 2013)
 IKK = Indeks Kemahalan Konstruksi (Tahun 2014)
 IPDRB = Indeks PDRB Perkapita (Tahun 2013)
 α = Bobot Indeks
 Kpf = Kapasitas Fiskal
 PAD = Pendapatan Asli Daerah
 DBH Pajak = Dana Bagi Hasil Pajak
 DBH SDA = Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Sumber Daya Alam

Gambar 2. Tahapan Formulasi Dana Alokasi Umum



Kebijakan *hold harmless* atau alokasi DAU yang tidak boleh lebih rendah dibandingkan DAU sebelumnya yang tidak berlaku lagi sejak tahun 2008, berdampak pada perolehan DAU yang sepenuhnya berdasar formula DAU (penghitungan DAU murni). Sehingga dalam mengatasi ketimpangan kemampuan fiskal antar daerah, ada beberapa kemungkinan penghitungan celah fiskal maupun DAU.

Tabel 1. Beberapa Kemungkinan Penghitungan Celah Fiskal dan Dana Alokasi Umum

ALTERNATIF	ALOKASI DASAR	CELAH FISKAL	JUMLAH DAU
(1)	(2)	(3)	(4)
1	AD	> 0	AD + CF
2	AD	0	AD
3	AD	< 0	AD - CF
4	AD	< 0 atau $\geq AD$	0

1. Apabila Celah Fiskal positif ($CF > 0$) atau kebutuhan fiskal lebih besar dari pada kapasitas fiskal, maka daerah akan menerima DAU sebesar alokasi dasar ditambah dengan nilai Celah Fiskal.
2. Apabila Celah Fiskal sama dengan nol ($CF = 0$) atau kebutuhan fiskal sama dengan kapasitas fiskal, maka daerah akan menerima DAU sebesar alokasi dasar.
3. Apabila Celah Fiskal negatif ($CF < 0$) atau kebutuhan fiskal lebih kecil daripada kapasitas fiskal dan nilai celah fiskal lebih kecil dari alokasi dasar, maka daerah akan menerima DAU sebesar alokasi dasar dikurangi dengan nilai celah fiskal.
4. Apabila Celah Fiskal negatif ($CF < 0$) atau kebutuhan fiskal lebih kecil daripada kapasitas fiskal dan nilai celah fiskal sama atau lebih besar dari alokasi dasar, maka hasil penghitungan DAU adalah nol atau negatif. Untuk kasus negatif akan disesuaikan menjadi nol yang berarti daerah tidak menerima DAU.

1.2. Kegunaan

Dalam pelaksanaan program pembangunan, pemerintah hendaknya mampu melaksanakan pembangunan secara merata dan terarah sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sangat erat

kaitannya dengan kinerja pemerintah. Semakin baik kinerja pemerintah maka semakin besar pula manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Aceh Barat tahun 2014 diharapkan dapat menjadi *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis Kabupaten Aceh Barat, karena semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga barang konstruksi di daerah tersebut. Dengan demikian, sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan IKK bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, perlu dilakukan analisis untuk melihat secara utuh berbagai aspek tentang IKK seperti:

1. Metode penghitungan IKK 2014;
2. Peranan IKK dalam menentukan Dana Alokasi Umum (DAU); dan
3. Perbandingan IKK Kabupaten Aceh Barat tahun 2014 terhadap kabupaten/kota secara Nasional.

Adapun maksud dan kegunaan pengukuran IKK Kabupaten Aceh Barat tahun 2014 itu sendiri adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan data dasar dalam rangka kebijakan dana perimbangan 2015 dan utamanya digunakan sebagai salah satu variabel kebutuhan fiskal dalam penghitungan DAU untuk pengalokasian anggaran tahun 2015;
2. Sebagai alat ukur tingkat kemahalan harga bangunan dan perbandingan tingkat kesulitan geografis dengan kabupaten/kota lainnya;
3. Membantu meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan konstruksi di Kabupaten Aceh Barat; dan
4. Sebagai standarisasi harga khususnya barang dan jasa yang digunakan dalam kegiatan konstruksi, sehingga dapat ditentukan kewajaran suatu anggaran proyek oleh tim pembahas anggaran proyek.

BAB 2

METODOLOGI

<http://acehbarokab.bps.go.id>

<http://acehbarokab.bps.go.id>

2. METODOLOGI

2.1 Ruang Lingkup

Tidak ada dua gedung kantor yang identik atau jembatan yang sama persis, karena masing-masing memiliki karakter dan desain yang dibuat khusus untuk ditempatkan pada lokasi masing-masing. Penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) didasarkan atas suatu pendekatan atau kompromi tertentu. Misalnya yang menjadi objek adalah bangunan tempat tinggal, maka bangunan tempat tinggal tersebut harus mengakomodir berbagai macam rancangan dan model.

Untuk tujuan membandingkan harga konstruksi antar wilayah/daerah, dikenal ada dua metode penghitungan, yaitu pertama dengan pendekatan input dan kedua dengan pendekatan harga output. Pendekatan harga input yaitu dengan mencatat semua material penting yang digunakan digabung dengan upah dan sewa peralatan sesuai dengan bobotnya masing-masing. Kelemahan metode ini adalah bahwa kegiatan konstruksi dianggap mempunyai produktivitas yang sama dan tidak mempertimbangkan *overhead cost*. Pendekatan output dilakukan dengan cara menanyakan harga konstruksi yang sudah jadi. Pada pendekatan output kelemahannya adalah bahwa dalam harga bangunan sudah termasuk manajemen *cost* dan keuntungan kontraktor yang bervariasi antar daerah dan antar proyek, sehingga tidak memadai untuk tujuan membandingkan kemahalan konstruksi antar wilayah. Alternatifnya adalah mengumpulkan harga konstruksi yang bisa mencakup *overhead cost* dan produktivitas pekerja tanpa memasukkan manajemen *cost* dan keuntungan kontraktor. Caranya adalah dengan mengumpulkan harga komponen bangunan seperti harga dinding, atap dan sebagainya. Apabila harga-harga komponen tersebut digabungkan maka akan didapatkan harga total proyek yang besarnya berada di atas harga input tetapi di bawah harga output karena sudah memasukkan *overhead cost* dan upah tetapi mengeluarkan biaya

manajemen dan keuntungan kontraktor. Data seperti ini bisa didapatkan dari dokumen *Bill of Quantity (BoQ)* satu proyek yang sudah selesai.

Dengan digunakannya realisasi APBD pembentukan modal tetap sebagai salah satu penimbang IKK, maka setiap tahun IKK satu kabupaten/kota relatif terhadap kabupaten/kota berubah-ubah tergantung dari realisasi APBD masing-masing kabupaten/kota. Penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota tahun 2014 mencakup 511 Kabupaten/Kota, sedangkan IKK provinsi dihitung di 34 provinsi.

2.2 Perbedaan dengan IKK 2013

Sebagaimana diketahui bahwa IKK sudah dihitung sejak tahun 2003. Penimbang yang digunakan untuk menghitung IKK adalah *BoQ* tahun 2003. Perkembangan teknik sipil sangat cepat ditambah lagi dengan pesatnya industri bahan bangunan. Saat ini material yang digunakan untuk kegiatan konstruksi juga banyak berubah. Hal-hal tersebut mengakibatkan *BoQ* 2003 yang selama ini digunakan untuk menghitung IKK tidak lagi sesuai dengan kondisi di lapangan. Oleh karena itu, mulai tahun 2013 penghitungan IKK sudah menggunakan *BoQ* terbaru yang dikumpulkan pada tahun 2012. Sedangkan IKK tahun 2014 menggunakan penimbang yang lebih lengkap dan *up to date* dengan menggunakan *BoQ* tahun 2012 dan *updating BoQ* tahun 2013.

Data harga perdagangan besar untuk komoditi konstruksi yang cenderung meningkat setiap bulannya mendorong pendataan IKK lebih dari sekali dalam 1 tahun. Seperti pada tahun sebelumnya, IKK tahun 2014 menggunakan data harga komoditi yang dikumpulkan secara triwulanan. Pendataan IKK akan dilaksanakan 4 kali dalam 1 tahun yakni bulan Januari, April, Juli dan Oktober sehingga lebih representatif dibandingkan hanya menggunakan satu kali pengambilan data lapangan.

2.3 Metode Penghitungan

2.3.1 Penghitungan IKK 2014

Untuk menghitung indikator IKK ini dibutuhkan beberapa komponen antara lain data harga konstruksi yang meliputi harga bahan bangunan/konstruksi, harga sewa alat-alat berat konstruksi, upah jasa konstruksi dan data bobot/diagram timbangan umum IKK kabupaten/kota berupa nilai masing-masing bahan bangunan utama yang dibutuhkan untuk membangun 1 (satu) unit bangunan per satuan ukuran luas dari 5 jenis bangunan. Survei ini dilakukan di seluruh kabupaten/kota di seluruh Indonesia dengan tujuan untuk menyediakan data harga bahan bangunan/konstruksi, harga sewa alat-alat berat konstruksi dan upah jasa konstruksi. Pada penghitungan IKK tahun 2014, Kota Samarinda dijadikan kota referensi dengan maksud supaya ada keterbandingan dengan IKK tahun sebelumnya. Untuk IKK tingkat provinsi data harga yang digunakan adalah rata-rata geometrik setiap komoditi dari seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi masing-masing dengan Provinsi Kalimantan Timur sebagai provinsi referensinya.

Misalkan p_{kn} adalah harga komponen konstruksi n di kabupaten k ($k = 1, 2, \dots, K; n = 1, 2, \dots, N$). Maka model statistik metode *Country Product Dummy* (CPD) dituliskan sebagai

$$\begin{aligned} p_{kn} &= \ln a_k + \ln b_n + \ln u_{kn} \\ &= a_k + y_n + v_{kn} \end{aligned}$$

Parameter a_k diartikan sebagai tingkat harga konstruksi di kabupaten k relatif terhadap harga konstruksi di kabupaten lain yang sedang dibandingkan. Bila a_k adalah harga konstruksi di Kabupaten K relatif terhadap 1 (satu), yaitu harga di Kabupaten X . Dengan kata lain, harga konstruksi di kabupaten K setinggi a_k dibanding harga konstruksi di Kabupaten X . Karena IKK di Kabupaten K dinyatakan sebagai $IKK_k = \exp(a_k)$. Persamaan di atas dikalikan dengan 100 sehingga perbandingan data dinyatakan dalam persen.

2.3.2 Penghitungan Diagram Timbang IKK 2014

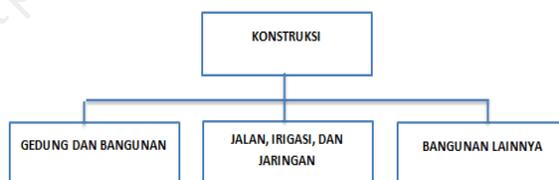
Pengumpulan data harga di sektor konstruksi menggunakan pendekatan *Basket of Construction Components Approach (BOCC)*. Metode pendekatan ini didesain untuk tujuan perbandingan antar wilayah. Data harga yang dikumpulkan terdiri dari komponen konstruksi utama dan input dasar yang umum dalam suatu wilayah.

Komponen konstruksi adalah output fisik konstruksi yang diproduksi sebagai tahap *intermediate* dalam proyek konstruksi. Elemen kunci dalam proses pendekatan ini adalah semua harga yang diestimasi berhubungan dengan komponen yang dipasang, termasuk biaya material, tenaga kerja dan peralatan. Tujuan penggunaan pendekatan *BOCC* adalah memberikan perbandingan harga konstruksi yang lebih sederhana dan biaya yang murah dan memungkinkan menggunakan metode *Bill of Quantity (BoQ)*.

Pendekatan *BOCC* didasarkan pada harga 2 jenis komponen, yakni komponen gabungan dan input dasar. Selanjutnya untuk tujuan estimasi perbandingan antar wilayah, komponen-komponen tersebut dikelompokkan dalam bentuk sistem-sistem konstruksi. Sistem-sistem tersebut selanjutnya dikelompokkan ke dalam *basic heading*.

Sektor konstruksi diklasifikasikan ke dalam 3 kategori yang disebut sebagai *basic heading* sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3. Kategori Sektor Industri



Gedung dan Bangunan yang termasuk dalam lingkup penghitungan diagram timbang IKK adalah sebagai berikut:

1. Konstruksi gedung tempat tinggal, meliputi: rumah yang dibangun sendiri, *real estate*, rumah susun dan perumahan dinas; dan

2. Konstruksi gedung bukan tempat tinggal, meliputi: konstruksi gedung perkantoran, industri, kesehatan, pendidikan, tempat hiburan, tempat ibadah, terminal/stasiun dan bangunan monumental lainnya.

Klasifikasi jalan, irigasi dan jaringan yang termasuk dalam penghitungan diagram timbang adalah sebagai berikut:

1. Bangunan pekerjaan umum untuk pertanian
 - a. Bangunan Pengairan meliputi: pembangunan waduk (*reservoir*), bendungan (*weir*), embung, jaringan irigasi, pintu air, sipon dan drainase, irigasi, talang, *check dam*, tanggul pengendalian banjir, tanggul laut, krib dan waduk; dan
 - b. Bangunan tempat proses hasil pertanian, meliputi: bangunan penggilingan dan bangunan pengeringan.
2. Bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan dan pelabuhan:
 - a. Pembangunan jalan, jembatan, landasan pesawat terbang, pagar/tembok, *drainase* jalan, marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas;
 - b. Bangunan jalan dan jembatan kereta meliputi pembangunan jalan dan jembatan kereta; dan
 - c. Bangunan dermaga, meliputi: pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan dermaga/pelabuhan, sarana pelabuhan dan penahan gelombang.
3. Bangunan untuk instalasi listrik, gas, air minum dan komunikasi
 - a. Bangunan elektrikal, meliputi: pembangkit tenaga listrik, transmisi, transmisi tegangan tinggi;
 - b. Konstruksi telekomunikasi udara, meliputi: konstruksi bangunan telekomunikasi dan navigasi udara, bangunan pemancar/penerima radar, bangunan antena;
 - c. Konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, pembangunan konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api
 - d. Konstruksi sentral telekomunikasi, meliputi: bangunan sentral telepon/telegraf, konstruksi menara pemancar radar *microwave*, bangunan stasiun bumi kecil/stasiun satelit;

- e. Instalasi air, meliputi: instalasi air bersih dan air limbah serta saluran drainase pada gedung;
- f. Instalasi listrik, meliputi: pemasangan instalasi pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan lemah dan pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan kuat;
- g. Instalasi gas, meliputi: pemasangan instalasi gas pada gedung tempat tinggal dan bukan tempat tinggal;
- h. Instalasi listrik jalan, meliputi: instalasi listrik jalan raya, instalasi listrik jalan kereta api dan instalasi listrik lapangan udara; dan
- i. Instalasi jaringan pipa, meliputi: jaringan pipa gas, jaringan air dan jaringan minyak.

Sementara itu, jenis bangunan yang tercakup dalam klasifikasi bangunan lainnya adalah sebagai berikut: bangunan terowongan, bangunan sipil lainnya (lapangan olahraga, lapangan parkir dan sarana lingkungan pemukiman), pemasangan perancah, pemasangan bangunan konstruksi *prefab* dan pemasangan kerangka baja, pengerukan, konstruksi khusus lainnya, instalasi jaringan pipa, dekorasi eksterior serta peningkatan mutu tanah melalui pengeringan dan pengerukan.

Sistem Konstruksi untuk Bangunan Rumah dan Gedung

Nama Sistem	Penjelasan Sistem
<i>Site-work (Persiapan)</i>	Sistem yang berisi komponen konstruksi yang berhubungan dengan pekerjaan persiapan dalam rangka pembangunan suatu proyek.
<i>Substructure</i>	Sistem yang berisi komponen struktur dan jenis pekerjaan di bawah permukaan tanah. Sistem ini menahan semua beban bagian bangunan yang berada di atasnya seperti balok, atap dan lainnya.
<i>Superstructure</i>	Sistem yang meliputi komponen struktur dan jenis pekerjaan di atas permukaan tanah. Sistem ini menahan beban bangunan di atasnya.
<i>Exterior Shell/ Building Envelope</i>	Sistem yang berisi komponen konstruksi yang menyelimuti bangunan (atap). Bangunan ini memberi beban pada sistem <i>superstructure</i> pada bangunan.
<i>Interior Partitions</i>	Sistem yang terdiri dari semua dinding dan bagian bangunan untuk jalan keluar masuk bangunan.
<i>Interior and Exterior Finishes</i>	Sistem yang meliputi komponen konstruksi yang bertujuan untuk memperindah bangunan, misalnya pengecatan.
<i>Mechanical and Plumbing</i>	Sistem yang meliputi komponen konstruksi yang mengatur suhu, saluran air, komunikasi, sistem pemadam kebakaran dan lainnya.
<i>Electrical</i>	Sistem yang meliputi komponen konstruksi yang berhubungan dengan distribusi listrik dalam sebuah bangunan.

Sistem Konstruksi untuk Jenis Bangunan Lainnya

Nama Sistem	Penjelasan Sistem
<i>Site-Work</i> (Persiapan)	Sistem yang berisi komponen konstruksi yang berhubungan dengan pekerjaan persiapan dalam rangka pembangunan suatu proyek.
<i>Substructure</i>	Sistem yang berisi komponen struktur dan jenis pekerjaan di bawah permukaan tanah. Sistem ini menahan semua beban dari struktur/bagian bangunan yang berada di atasnya.
<i>Superstructure</i>	Sistem yang meliputi komponen struktur dan jenis pekerjaan di atas permukaan tanah. Sistem ini menahan beban bangunan di atasnya.
<i>Mechanical Equipment</i>	Perlengkapan mekanik yang dipasang pada suatu bangunan seperti pompa, turbin, pipa penghubung, tower pendingin dan lainnya.
<i>Electrical Equipment</i>	Peralatan yang terpasang pada bangunan yang digunakan untuk sistem distribusi tenaga listrik, distribusi panel, pusat kontrol pencahayaan, komunikasi dan lainnya.
<i>Underground Utility</i>	Jaringan bawah tanah, sistem atau fasilitas yang digunakan untuk memproduksi, menyimpan, transmisi dan distribusi komunikasi atau telekomunikasi, listrik, gas, minyak bumi, saluran pembuangan akhir dan lainnya. Peralatan ini termasuk pipa, kabel, <i>fiber optic cable</i> dan lainnya yang terpasang di bawah permukaan tanah.

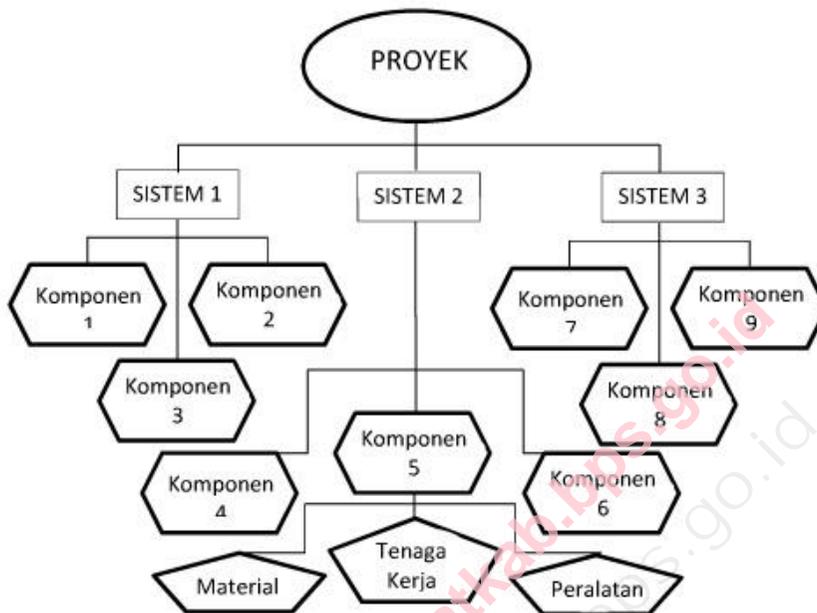
Komponen Konstruksi

Komponen adalah kombinasi dari beberapa material pada lokasi akhir yang dapat diidentifikasi secara jelas pada tujuannya dalam sebuah proyek bangunan dan juga sistemnya. Contoh komponen adalah beton, pengecatan eksterior, pengecatan interior, pondasi kolom, dan lainnya. Sebuah komponen secara umum terdiri dari beberapa material, tenaga kerja dan peralatan.

Biaya masing-masing komponen disusun dari biaya per unit dari material yang digunakan dan perkiraan kuantitas dari material, koefisien dan upah tenaga kerja, koefisien dan sewa peralatan yang digunakan untuk membangun komponen tersebut. Konsep mendasar dari pendekatan BOCC adalah mengukur relatif harga pada level komponen konstruksi. Sebuah komponen kemudian dibagi-bagi kembali ke dalam beberapa item pekerjaan konstruksi. Komponen konstruksi dapat dianggap sebagai agregasi dari beberapa item pekerjaan konstruksi yang meliputi material, tenaga kerja dan peralatan yang diperlukan untuk menyelesaikan item pekerjaan tersebut.

Komponen-komponen yang digunakan dalam penghitungan diagram timbang IKK 2014 berbeda antara bangunan 1 (bangunan tempat tinggal), bangunan 2 (bangunan umum untuk pertanian, bangunan umum untuk jalan, jembatan dan pelabuhan, bangunan umum untuk jaringan air, listrik dan komunikasi) dan bangunan 3 (bangunan lainnya).

Gambar 4. Hubungan antara Proyek, Sistem dan Komponen



Pendekatan *BOCC* menggunakan 3 sistem penimbang, yaitu:

1. W1 adalah penimbang yang digunakan pada level agregasi jenis bangunan seperti bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan umum untuk pertanian, jalan, jembatan, jaringan dan bangunan lainnya;
2. W2 adalah penimbang untuk agregasi pada level sistem konstruksi; dan
3. W3 adalah penimbang untuk agregasi pada level komponen yang termasuk upah tenaga kerja dan sewa peralatan.

Prosedur Penghitungan Penimbang

Langkah awal yang dilakukan untuk menghitung penimbang IKK adalah mengumpulkan *Bill of Quantity (BoQ)*. Pengumpulan *BoQ* ini dilakukan melalui survei diagram timbang IKK tahun 2014. *BoQ* yang dikumpulkan dalam survei ini adalah *BoQ* realisasi pembangunan suatu konstruksi selama tahun 2013 di kabupaten/kota yang bersangkutan. Jika tidak ada pembangunan selama tahun 2013 maka bisa digantikan dengan

BoQ dari pembangunan pada tahun 2012. *BoQ* ini dikumpulkan dari masing-masing kabupaten/kota agar setiap kabupaten/kota memiliki penimbang yang sesuai dengan karakteristik pembangunan di wilayahnya masing-masing.

Tahapan penghitungan diagram timbang dari data *BoQ* untuk masing-masing kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Pengkodean Data *BoQ*

Pengkodean merupakan langkah awal yang dilakukan dalam pengolahan data *BoQ*. Terdapat beberapa macam kode yang diberikan, diantaranya:

- a. Melakukan pengkodean jenis bangunan dan kabupaten/kota untuk masing-masing jenis dokumen *BoQ* yang dikumpulkan;
- b. Melakukan pengkodean sistem pada setiap uraian pekerjaan yang terdapat dalam *BoQ*; dan
- c. Melakukan pengkodean jenis komponen dari setiap uraian pekerjaan yang terdapat dalam *BoQ*.

Setiap uraian pekerjaan *BoQ* terdapat beberapa bahan bangunan, tenaga kerja yang digunakan, dan sewa peralatan.

2. Menghitung *share* nilai untuk masing-masing tahapan penimbang(W1, W2 dan W3) setiap kabupaten/kota

- a. Menghitung penimbang W1 setiap kabupaten/kota

Pada tahapan penimbang W1 dihitung *share* nilai setiap sistem untuk masing-masing bangunan.

Nilai Sistem adalah jumlah nilai dari seluruh bahan bangunan, upah tenaga kerja, sewa peralatan yang digunakan dalam suatu sistem konstruksi. Penimbang W1 diperoleh dengan menggunakan rumus berikut:

$$W1_i = \frac{\text{Nilai Sistem}_i}{\sum_{i=1}^{n1} \text{Nilai Sistem}_i}$$

$n1 = 1,2,\dots,8$ untuk bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal

$n1 = 1,2,\dots,6$ untuk bangunan selainnya

b. Menghitung penimbang W2 setiap kabupaten/kota

Pada tahapan penimbang W2 dihitung *share* nilai setiap komponen untuk masing-masing sistem.

Nilai komponen adalah jumlah nilai dari seluruh bahan bangunan, upah tenaga kerja, sewa peralatan yang digunakan dalam sebuah komponen konstruksi. Penimbang W2 bisa diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$W2_{ij} = W1_i \cdot \frac{\text{Nilai Komponen}_{ij}}{n_2^j \text{Nilai Komponen}_{ij}}$$

n_2 menunjukkan jumlah komponen dalam sistem yang bersangkutan.

c. Menghitung *share* untuk penimbang W3 setiap kabupaten/kota

Pada tahapan penimbang W3 dihitung *share* nilai setiap komoditi untuk masing-masing komponen. Penimbang W3 bisa diperoleh dengan rumus berikut:

$$W3_{ijk} = W2_{ij} \cdot \frac{\text{Nilai Komoditi}_{ijk}}{n_3^k \text{Nilai Komponen}_{ijk}}$$

n_3 menunjukkan jumlah komoditi pada komponen yang bersangkutan. Dimana:

$$\begin{aligned} n_1^i W_i &= 1 \\ n_1^i n_2^j W_{ij} &= 1 \\ n_1^i n_2^j n_3^k W_{ijk} &= 1 \end{aligned}$$

Selain sistem penimbang dengan menggunakan pendekatan *BOCC*, untuk menghitung IKK juga menggunakan penimbang umum (WO) yang digunakan sebagai penghubung masing-masing jenis bangunan menjadi suatu kesatuan konstruksi. Penimbang umum berasal dari realisasi anggaran kabupaten/kota untuk pembangunan konstruksi yang diperoleh melalui survei Keuangan Pemda Tingkat II (K-II) dari Subdirektorat

Keuangan dan Teknologi Informasi dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dari data realisasi anggaran daerah tingkat II untuk pembangunan masing-masing jenis bangunan diperoleh bobot masing-masing jenis bangunan ke total konstruksi di kabupaten/kota yang bersangkutan.

2.4 Kegiatan Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data harga bahan bangunan/konstruksi, sewa alat berat, upah jasa konstruksi ini mencakup:

1. Pengumpulan data harga bahan bangunan, harga sewa alat-alat berat yang digunakan dalam kegiatan konstruksi dilakukan di seluruh kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia;
2. Jenis bahan bangunan/konstruksi yang dikumpulkan data harganya adalah jenis barang yang digunakan dalam kegiatan konstruksi seperti yang terangkum dalam kuesioner VIKK2014;
3. Harga sewa alat-alat berat konstruksi yang dikumpulkan adalah alat-alat berat yang biasa digunakan dalam kegiatan konstruksi seperti yang tertuang dalam kuesioner VIKK2014;
4. Upah jasa konstruksi meliputi upah per satuan/unit dan tunjangan lainnya dari mandor, kepala tukang, tukang batu, tukang kayu, tukang cat, tukang listrik dan pembantu tukang;
5. Responden survei IKK adalah pedagang grosir/distributor/pedagang yang menjual bahan bangunan/konstruksi ke kontraktor, dan kategori lainnya seperti: kontraktor, dinas PU atau instansi terkait lainnya (khusus untuk mengumpulkan data harga sewa alat-alat berat, upah pekerja konstruksi). Pemilihan responden dilakukan secara purposif dengan mengutamakan pedagang grosir. Jika tidak ada pedagang grosir maka dipilih responden dengan urutan skala prioritas yaitu produsen kemudian pedagang campuran (grosir melayani eceran). Khusus untuk responden pedagang campuran, yang dicatat adalah harga untuk penjualan barang dalam paratai besar (grosir).

6. Kegiatan pencacahan survei ini dilakukan pada tanggal 20-30 bulan Januari, April, Juli dan Oktober 2014.

2.5 Kuesioner yang Digunakan

Untuk mengumpulkan data harga bahan bangunan, upah jasa konstruksi dan sewa alat berat digunakan 1 (satu) daftar pertanyaan yakni daftar VIKK2014.

Identifikasi Kualitas Barang

Agar hasil pengumpulan data harga dalam survei ini sesuai dengan kebutuhan data harga seperti yang tertuang dalam daftar VIKK2014, maka perlu dilakukan pemilihan kualitas sebagai berikut:

1. Kualitas terpilih harus sesuai ketentuan, yaitu kualitas yang biasanya (umum) ada dan digunakan di tiap-tiap kabupaten/kota dan tertulis dalam pilihan Daftar VIKK2014.

Contoh :

Jenis barang : Kayu Balok

Kualitas : kayu kelas I, kayu kelas II dan seterusnya.

Apabila kualitas jenis barang tidak tersedia dalam pilihan, maka pilih kualitas yang tersedia di pedagang dan dominan digunakan di kabupaten/kota bersangkutan dengan menggunakan satuan standar yang tertulis dalam daftar.

2.6 Konsep dan Definisi

Beberapa konsep dan definisi umum yang digunakan dalam proses pengumpulan data dan penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) antara lain adalah sebagai berikut:

1. **Harga Perdagangan Besar/Grosir (HPB)** adalah harga **transaksi yang sudah terjadi** antara pedagang besar/grosir sebagai penjual dengan

pedagang berikutnya sebagai pembeli secara *party/grosir* atas suatu barang;

2. **Harga Produsen** adalah harga transaksi yang sudah terjadi antara produsen sebagai penjual dengan pedagang besar/distributor sebagai pembeli secara *party/grosir* atas suatu barang;
3. **Harga Eceran** adalah harga transaksi yang sudah terjadi antara pedagang sebagai penjual dengan rumah tangga sebagai pembeli yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga langsung, **bukan untuk ditransaksikan lagi** atas suatu barang;
4. **Bahan bangunan/konstruksi** adalah material yang digunakan dalam pembentukan komponen bangunan dan ditempatkan pada bagian suatu bangunan/konstruksi yang merupakan satu kesatuan dari bangunan tersebut;
5. **Produsen** adalah pembuat/penghasil material baik dilakukan secara manual maupun dengan bantuan peralatan/mesin;
6. **Pedagang grosir** adalah orang atau badan usaha yang membeli dan menjual bahan bangunan kepada pedagang lain atau kontraktor bangunan;
7. **Pedagang campuran** adalah orang atau badan usaha yang membeli dan menjual bahan bangunan kepada pedagang lain, kontraktor bangunan dan rumah tangga;
8. **Kegiatan konstruksi** adalah suatu kegiatan meliputi perencanaan, persiapan, pembuatan, pembongkaran dan perbaikan bangunan yang hasil akhirnya berupa bangunan/konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi yang dimaksud dalam survei ini adalah hanya kegiatan investasi (pembangunan baru, bukan renovasi yang tidak menambah nilai aset). Hasil kegiatan antara lain: gedung, jalan jembatan, rel dan jembatan kereta api, terowongan, bangunan air dan drainase, bangunan sanitasi, landasan pesawat terbang, dermaga, bangunan pembangkit listrik, transmisi, distribusi dan bangunan jaringan komunikasi;

9. **Harga sewa alat berat konstruksi** adalah harga yang terjadi ketika seseorang/organisasi/institusi menyewa alat-alat berat yang digunakan untuk kegiatan konstruksi dalam periode tertentu seperti dalam waktu jam, hari, mingguan atau bulanan. Satuan/unit yang digunakan dalam harga sewa ini adalah unit/jam. Harga sewa hanya biaya sewa alat, tidak termasuk biaya mobilisasi alat dari penyewa ke lokasi proyek dan juga tidak termasuk biaya jasa operator;
10. ***Hidraulic Excavator*** adalah suatu mesin alat berat yang berfungsi untuk menggali tanah dan menuangkannya ke tempat lain;
11. ***Buldozer/Tracked Tractor*** adalah alat berat yang berfungsi untuk menggusur/memindahkan (mendorong) tanah dalam jarak pendek;
12. ***Skid Steer Loader*** adalah sebuah *loader* dengan *frame body* kecil yang kaku dan kuat, mesin yang bertenaga dengan *lift arm* (lengan angkat) yang digunakan untuk memasang berbagai *tools* (peralatan) dan tambahan lainnya;
13. ***Tandem Vibrating Roller*** adalah mesin penumbuk/pemadat jalan tipe tandem dengan penggerak roda belakang. Peralatan dilengkapi dua roda *silindrical steel wheel* (roda baja) dengan ukuran sama dan perangkat vibrator, sehingga alat ini juga berfungsi sebagai *compactor*;
14. ***Compact Track Loader*** adalah alat berat beroda karet, hanya mampu beroperasi di daerah yang keras dan rata;
15. ***Dumptruck*** adalah kendaraan angkut jarak jauh mempunyai bak angkut yang bisa diungkit secara hidrolik untuk menurunkan muatannya;
16. **Balas jasa konstruksi** adalah upah/gaji dan tunjangan lainnya yang diberikan kepada tenaga kerja di bidang konstruksi tiap satuan/unit orang/hari (O-H). Tunjangan lainnya yang dimaksud adalah semua pendapatan yang diterima oleh tenaga kerja sektor konstruksi yang berupa makanan, perumahan/penginapan, jaminan sosial dan sebagainya;
17. **Mandor** adalah pekerja konstruksi yang memiliki tugas untuk mengawasi jalannya proyek dan berkoordinasi dengan kepala tukang. Pada pekerjaan yang lebih kecil, Mandor merangkap kepala tukang;

- 18. Kepala tukang** adalah pekerja konstruksi yang memiliki tugas mengawasi dan membimbing buruh konstruksi untuk bekerja sesuai dengan yang diinginkan;
- 19. Tukang batu** adalah buruh yang memiliki tugas untuk memasang batu kali, batu bata, ubin dan membuat plester tembok. Alat kerja yang digunakan biasanya adalah cetok, mal, dan *water pass*;
- 20. Tukang kayu** adalah buruh konstruksi yang mempunyai tugas untuk membuat struktur bangunan dari kayu dan alat kerja yang digunakan biasanya adalah serut, gergaji, bor, pahat dan lain-lain;
- 21. Tukang cat** adalah buruh konstruksi yang bekerja untuk mengecat tembok, papan dan dinding lainnya; dan
- 22. Tukang listrik** adalah buruh konstruksi yang memiliki tugas memasang instalasi listrik dan perlengkapannya serta memasang sistem listrik generator, trafo, dan lain-lain.

BAB 3

STATISTIK IKK

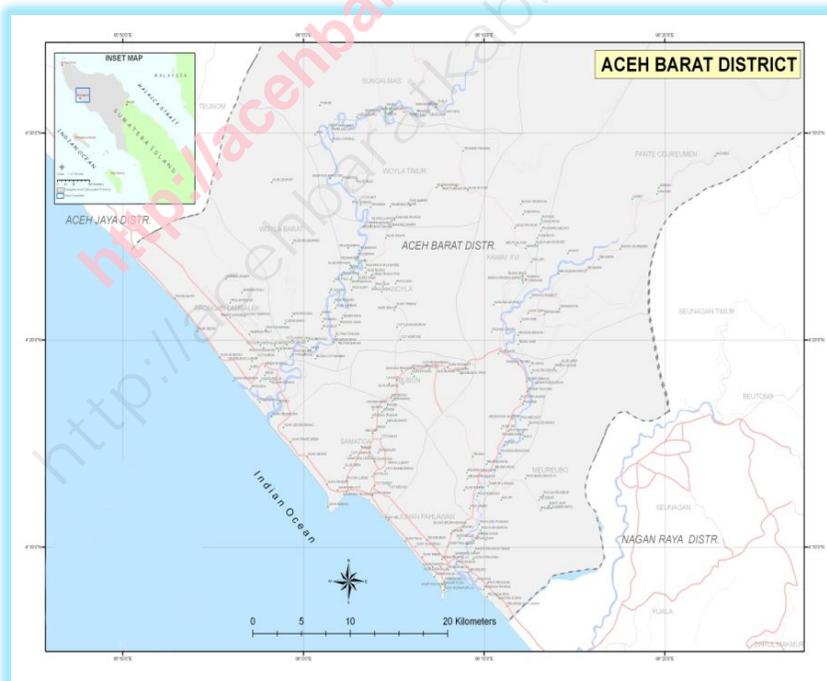
<http://acehbaratkab.bps.go.id>
<http://acehbaratkab.bps.go.id>

3. STATISTIK IKK

3.1. Luas Wilayah

Kabupaten Aceh Barat terletak antara 04°06' - 04°47' Lintang Utara dan 95°52' - 96°30' Bujur Timur dengan luas mencapai 2.927,95 Km². Dengan mekarnya Desa Keuramat pada tahun 2012, Kabupaten Aceh Barat terdiri atas 12 Kecamatan, 33 mukim dan 322 gampong (desa). Kecamatan terluas adalah Sungai Mas yang menempati 26,70% wilayah Aceh Barat. Sedangkan kecamatan terkecil adalah Johan Pahlawan yang merupakan ibukota Kabupaten Aceh Barat. Luas Kecamatan ini hanya 44,91 Km² atau hanya 1,53% dari luas Kabupaten Aceh Barat.

Gambar 5. Peta Wilayah Kabupaten Aceh Barat



Sumber: Aceh Barat Dalam Angka 2014

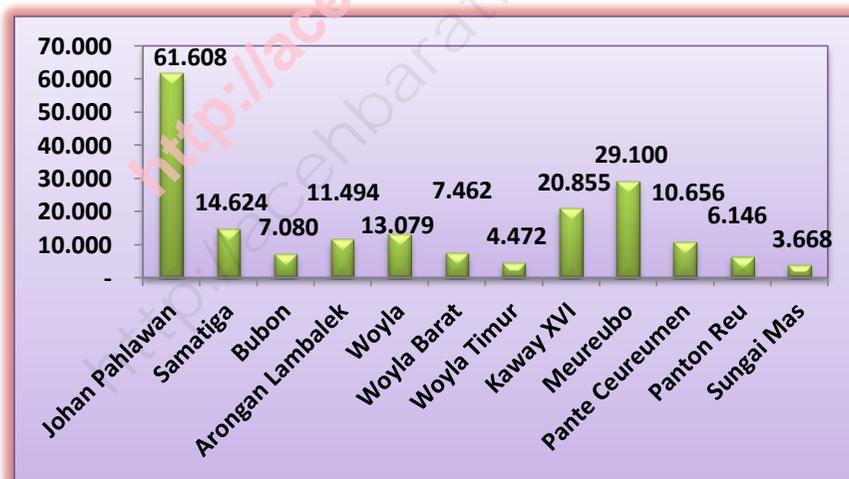
Kabupaten Aceh Barat berbatasan dengan Kabupaten Pidie Jaya dan Aceh Jaya di sebelah utara, kemudian di sebelah selatan berbatasan dengan

Kabupaten Nagan Raya dan Samudera Indonesia. Sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh tengah dan Nagan Raya, sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.

3.2. Penduduk Pertengahan 2014

Jumlah penduduk pertengahan tahun 2014 di Kabupaten Aceh Barat sebanyak 190.244 jiwa yang terdiri dari 96.528 jiwa penduduk laki-laki dan 93.716 jiwa penduduk perempuan. Kabupaten Aceh Barat mengalami penambahan penduduk sebesar 2.785 jiwa atau sekitar 1,49 persen dari penduduk pada tahun 2013. Jumlah penduduk laki-laki secara umum lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan. Hal ini ditunjukkan oleh sex ratio yang nilainya lebih besar dari 100 yakni 103 persen. Dengan kata lain, penduduk laki-laki lebih besar 3 persen dibanding perempuan.

Gambar 6. Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Barat Tahun 2014



Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat

Penduduk terbanyak berada di Kecamatan Johan Pahlawan yang menjadi ibukota Aceh Barat, yaitu 61.608 jiwa, sedangkan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Sungai Mas yaitu sebesar 3.668 jiwa. Dengan jumlah penduduk tersebut, Kecamatan Johan Pahlawan menjadi wilayah

terpadat dengan rata-rata 1.371 jiwa/km², sebaliknya Kecamatan Sungai Mas memiliki kepadatan penduduk yang terendah yaitu 5 jiwa/km².

3.3. Keuangan Daerah

Tabel 2. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013

Uraian Pendapatan (1)	Jumlah Anggaran (Rupiah) (2)
I. Pendapatan Asli Daerah	45.928.106.803
a. Pajak Daerah	11.494.461.993
b. Retribusi Daerah	19.242.181.321
c. Bagian Laba Badan Usaha Daerah	3.375.202.713
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	12.816.260.776
II. Dana Perimbangan	610.304.629.500
a. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	33.621.752.500
b. Dana Alokasi Umum	507.582.407.000
c. Dana Alokasi Khusus	69.100.470.000
III. Lain-lain Pendapatan yang Sah	63.225.033.352
Jumlah	720.457.769.655

Sumber: Aceh Barat Dalam Angka 2014

Pembangunan daerah tidak terlepas dari kondisi keuangan di daerah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan mampu memaksimalkan potensi sumber pendapatan daerah sehingga tidak terlalu menggantungkan diri pada keuangan pemerintah pusat. Kenyataannya, hampir seluruh daerah di Indonesia masih menggantungkan diri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) karena minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Barat tahun 2013 sebesar Rp. 46.928.106.803,-. Sementara itu, Dana Perimbangan Kabupaten Aceh Barat tahun 2013 sebesar Rp. 610.304.629.500,-.

3.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita 2013

Dibandingkan tahun sebelumnya, perekonomian Kabupaten Aceh Barat tahun 2013 mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Aceh Barat atas dasar harga berlaku tahun 2012 sebesar 3.499.452,71 juta rupiah yang mengalami peningkatan sebesar 10,27 persen, sehingga menjadi 3.859.004,63 juta rupiah pada tahun 2013.

Secara sektoral, kontribusi sektor Pertanian merupakan yang terbesar, dimana sektor tersebut menyumbang 36,58 persen bagi perekonomian Kabupaten Aceh Barat. Kemudian disusul oleh sektor Perdagangan Hotel dan Restoran di urutan kedua sebesar 18,01 persen. Selain itu, pada tahun 2013 Kabupaten Aceh Barat juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif yaitu sebesar 5,22 persen.

Pada tahun 2013, pertumbuhan masing-masing sektor di Kabupaten Aceh Barat mengalami pertumbuhan yang positif. Dari tabel berikut dapat diketahui bahwa kontribusi sektor konstruksi terhadap Produk Domestik Regional Bruto dalam kurun waktu 2012-2013 mengalami penurunan. Proses penyelesaian pembangunan jalan di tahun 2012 memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 13,01 persen. Sementara itu, kontribusi yang sebagian besar berasal dari proses pembangunan pelabuhan ekspor batubara membuat kontribusi yang dihasilkan hanya mencapai 12,96 persen pada tahun 2013.

Beberapa sektor lain dengan pertumbuhan tinggi tetapi tetap saja tidak terlalu banyak mempengaruhi nilai PDRB Kabupaten Aceh Barat karena kontribusinya yang sangat kecil. Sektor pertambangan dan penggalian yang mengalami pertumbuhan sebesar 93,77 persen dan kontribusi yang diberikan hanya 1,34 persen. Sektor keuangan, *real estate*

dan jasa perusahaan tumbuh sekitar 17,50 persen, sehingga kontribusi yang diberikan sebesar 2,62 persen. Selanjutnya Sektor listrik, gas dan air bersih yang mengalami pertumbuhan sebesar 7,32 persen, tetapi kontribusi yang diberikan kurang dari 1 persen (0,53 persen). Sektor berikutnya diikuti oleh sektor industri pengolahan yang tumbuh sebesar 5,65 persen dan kontribusi yang diberikan sebesar 1,52 persen.

Tabel 3. Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Ekonomi Tahun 2012–2013

Sektor Ekonomi	Pertumbuhan (%)		Kontribusi (%)	
	2012*)	2013**)	2012*)	2013**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian	4,98	3,9	37,31	36,58
2. Pertambangan dan Penggalian	21,46	93,77	0,66	1,34
3. Industri Pengolahan	8,46	5,65	1,46	1,52
4. Listrik, Gas, & Air Bersih	8,85	7,32	0,47	0,53
5. Konstruksi	9,77	5,12	13,01	12,96
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	2,45	3,92	18,37	18,01
7. Pengangkutan & Komunikasi	3,94	5,56	5,63	8,93
8. Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan	11,82	17,5	2,25	2,62
9. Jasa-jasa	4,96	4,98	17,83	17,5
PDRB	5,03	5,22	100	100

*) Angka Sementara

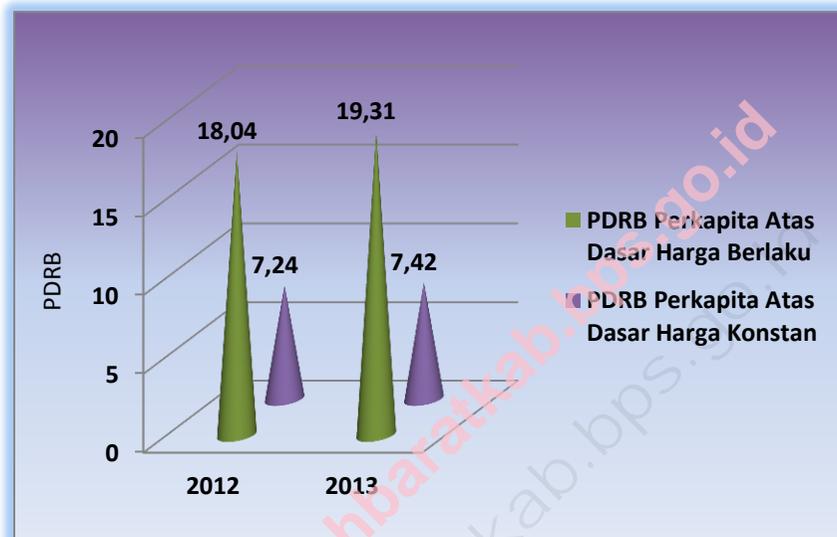
**) Angka Sangat Sementara

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Aceh Barat 2010-2013

Tabel 4 juga memperlihatkan beberapa sektor mengalami pertumbuhan yang signifikan sekaligus memberikan kontribusi yang besar pada tahun 2013. Sektor jasa-jasa memberikan kontribusi sebesar 17,50 persen dengan pertumbuhan sebesar 4,98 persen. Selanjutnya sektor

pengangkutan & komunikasi tumbuh sebesar 5,56 persen dengan kontribusi yang semakin meningkat menjadi 8,93 persen.

Gambar 7. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012–2013 (Juta Rupiah)



Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Aceh Barat 2010-2013

Bila dilihat dari nilai PDRB perkapita atas dasar harga berlaku di Kabupaten Aceh Barat, secara umum tingkat pendapatan penduduk Kabupaten Aceh Barat tahun 2013 mengalami peningkatan dibanding tahun 2012. Pada tahun 2012 PDRB perkapita penduduk Kabupaten Aceh Barat sebesar 18,04 juta rupiah, sedangkan pada tahun 2013 terjadi peningkatan sebesar 7,04 persen menjadi 19,31 juta rupiah.

Bila ditinjau dari harga konstan tahun 2000, maka PDRB perkapita penduduk Kabupaten Aceh Barat tahun 2013 mengalami kenaikan hanya sebesar 2,49 persen dibanding tahun sebelumnya, yaitu dari 7,24 juta rupiah di tahun 2012 menjadi 7,42 juta rupiah di tahun 2013.

3.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2013

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah. Pembangunan manusia di Kabupaten Aceh Barat terus mengalami perbaikan, terlihat dari angka Indeks Pembangunan Manusia yang terus meningkat sejak tahun 2011 hingga 2013. IPM Aceh Barat telah mengalami kenaikan sebesar 1,04 poin dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Capaian IPM yang terus meningkat dari tahun ke tahun merupakan indikasi positif bahwa kualitas manusia di Aceh Barat semakin membaik dari aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Gambar 8. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011-2013



Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Aceh Barat 2014

3.6. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2014

Penghitungan IKK dilakukan pada setiap kabupaten/kota dan provinsi se-Indonesia dengan menggunakan metode jenis barang dan jasa, serta waktu pencacahan yang sama sehingga hasilnya *comparable* untuk menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi antar wilayah se-Indonesia dalam kurun waktu yang sama.

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) tahun 2014 telah dihitung untuk 511 Kabupaten/Kota dari 34 provinsi di Indonesia, termasuk di antaranya adalah IKK Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. IKK Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2014 sebesar 102,28 dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Provinsi Aceh adalah 93,54. Adapun IKK rata-rata nasional adalah sebesar 100 dimana Kota Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan sebagai acuan (IKK Kota Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur sama dengan 100). IKK Provinsi Aceh yang berada di bawah IKK rata-rata nasional mencerminkan bahwa akses masyarakat di Provinsi Aceh secara umum dalam memperoleh bahan-bahan konstruksi masih relatif lebih mudah dan wilayahnya masih relatif lebih terjangkau dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia. Sementara itu, di Kabupaten Aceh Barat untuk memperoleh bahan-bahan konstruksi relatif lebih mahal dibandingkan nasional. Hal ini dapat dilihat dari nilai IKK Kabupaten Aceh Barat yang berada di atas IKK rata-rata nasional.

3.7. Perbandingan IKK Kabupaten Aceh Barat dengan Kabupaten/Kota Lain

Tabel 4. Nilai Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh Tahun 2014

IKK 2014			
No	Kode	KABUPATEN/KOTA	IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1101	Simeulue	112,83
2	1102	Aceh Singkil	106,38
3	1103	Aceh Selatan	89,93
4	1104	Aceh Tenggara	91,98
5	1105	Aceh Timur	101,12
6	1106	Aceh Tengah	103,33
7	1107	Aceh Barat	102,28
8	1108	Aceh Besar	91,00
9	1109	Pidie	92,18
10	1110	Bireuen	101,25
11	1111	Aceh Utara	108,34
12	1112	Aceh Barat Daya	96,46
13	1113	Gayo Lues	89,12
14	1114	Aceh Tamiang	96,75
15	1115	Nagan Raya	119,46
16	1116	Aceh Jaya	98,82
17	1117	Bener Meriah	99,66
18	1118	Pidie jaya	93,21
19	1171	Banda Aceh	102,26
20	1172	Sabang	99,30
21	1173	Langsa	93,06
22	1174	Lhokseumawe	105,71
23	1175	Subulussalam	75,83
1100		PROVINSI ACEH	93,54

Sumber: BPS Provinsi Aceh

Dari Tabel 4, menunjukkan bahwa angka Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) kabupaten/kota di Provinsi Aceh pada tahun 2014 berkisar antara 75 sampai dengan 120. Berdasarkan level provinsi Aceh, IKK Kota Subulussalam dengan nilai sebesar 75,83 adalah IKK dengan indeks terendah, sebaliknya posisi IKK tertinggi ialah Nagan Raya dengan nilai IKK 119,46. IKK Kabupaten Aceh Barat berada di urutan ke 7 dari 23 kabupaten/kota di Aceh.

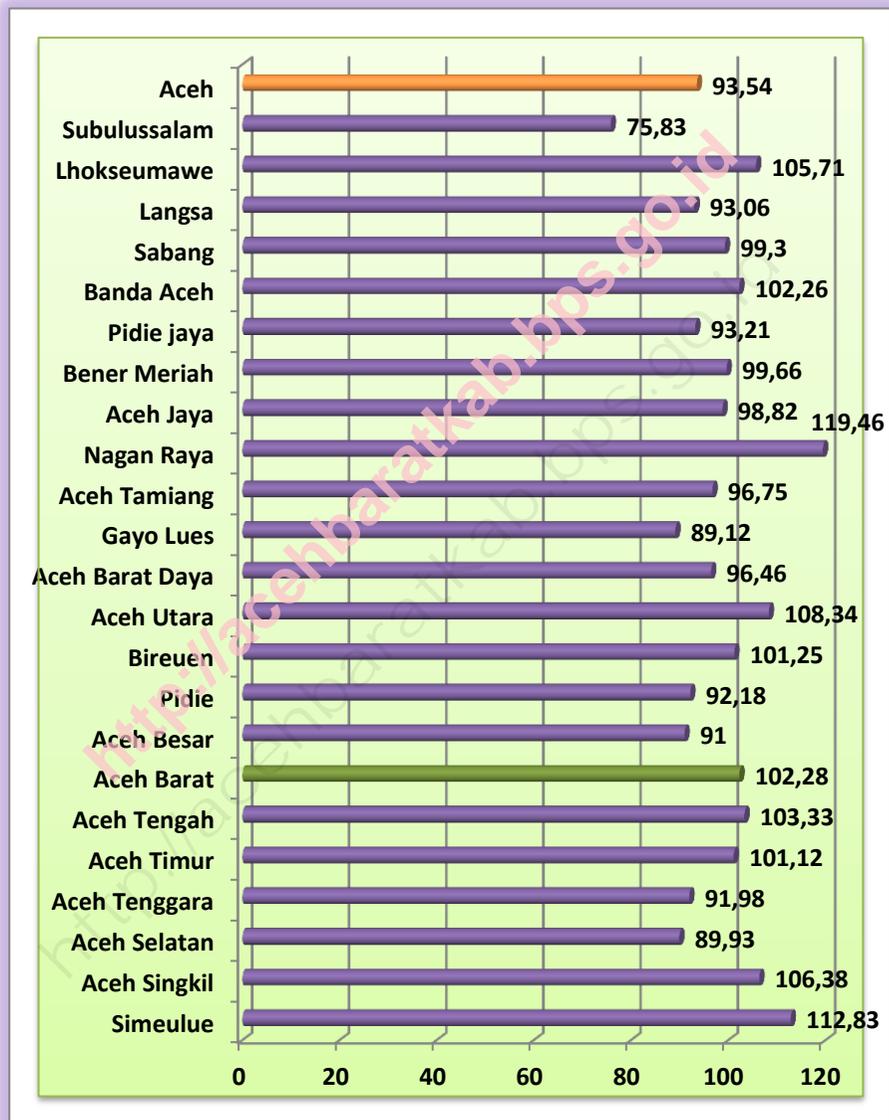
Sementara itu, untuk level provinsi, bila diurutkan dari yang tertinggi angka IKK Provinsi Aceh sebesar 93,54 menempati peringkat ke-22 dari 34 provinsi di Indonesia. IKK provinsi yang tertinggi adalah IKK Provinsi Papua sebesar 191,86 dan IKK terendah adalah IKK Provinsi NTB yaitu sebesar 81,00. Informasi lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 2.

Berdasarkan Gambar 8, terlihat bahwa pada tahun 2014 sebagian besar IKK kabupaten/kota di Provinsi Aceh menunjukkan angka lebih rendah dari 100, hanya 10 kabupaten/kota yang memiliki IKK diatas 100 yaitu Simeulue, Aceh Singkil, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Barat, Bireuen, Aceh Utara, Nagan Raya, Banda Aceh dan Lhokseumawe. IKK terendah senilai 75,83 merupakan IKK Kota Subulussalam dan nilai IKK tertinggi ialah Kabupaten Nagan Raya senilai 119,46. Disamping itu, angka IKK masing-masing kabupaten/kota yang berbeda-beda menunjukkan adanya variasi harga bangunan di masing-masing kabupaten/kota se-Provinsi Aceh sebagai dampak dari lokasi yang sulit dan jauh dari pusat-pusat perekonomian.

Sebagai indeks spasial, besaran IKK lebih dipengaruhi oleh tingkat harga komoditas bahan bangunan antar daerah dibandingkan dengan perkembangan harga antar waktu (*time series*) di suatu daerah. Di daerah-daerah yang jauh dari pusat produksi atau pusat distribusi, harga komoditas pada umumnya lebih mahal. Dengan kata lain, perbedaan harga barang antar daerah berkaitan erat dengan darimana barang tersebut berasal. Sebagian besar barang-barang yang masuk ke Kabupaten Aceh Barat berasal dari wilayah Medan, Sumatera Utara dan beberapa barang berasal dari Banda Aceh. Perbedaan harga antar daerah, selain dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi seperti permintaan dan penawaran, juga dipengaruhi

oleh faktor lain seperti jumlah pedagang besar di daerah tersebut dan kondisi jalan yang mempengaruhi jalur distribusi.

Gambar 9. Nilai Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh Tahun 2014



Sumber: BPS Provinsi Aceh

BAB 4 PENUTUP

<http://cehparatkab.bps.go.id>
<http://acehparatkab.bps.go.id>

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2014 Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Aceh Barat sebesar 102,28, lebih tinggi dibandingkan IKK rata-rata nasional yaitu IKK Kota Samarinda yang sebesar 100,00;
2. IKK Kabupaten Aceh Barat tahun 2014 berada pada posisi ke 7 dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh;
3. Untuk level provinsi, besaran IKK Provinsi Aceh berada di peringkat ke-22 tertinggi dari 34 provinsi di Indonesia dimana yang menjadi provinsi acuan adalah Provinsi Kalimantan Timur; dan
4. Variasi angka IKK kabupaten/kota di Provinsi Aceh menunjukkan adanya perbedaan biaya yang dibutuhkan untuk membangun satu unit bangunan per satuan luas pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

LAMPIRAN

<http://acehbaratkab.bps.go.id>

<http://acehbaratkab.bps.go.id>

Lampiran 1
**Komoditi Barang Konstruksi Penghitungan IKK 2014
di Kabupaten Aceh Barat**

RESPONDEN PEDAGANG GROSIR			
No	Jenis Barang	Kualitas Barang	Satuan/ Unit
(1)	(2)	(4)	(5)
1	Tanah Urug	Biasa	m ³
		Liat/Lempung	m ³
		Lainnya.....	m ³
2	Pasir	Pasir Pasang	m ³
		Pasir Beton / Cor	m ³
3	Batu Pondasi	Batu Kali Utuh	m ³
		Batu Kali Belah	m ³
		Batu Gunung	m ³
		Lainnya	m ³
4	Batu Bata	Batu bata tanah liat (bata merah)	m ³
		Batu bata tanah liat (bata muka)	m ³
		Lainnya	m ³
5	Batu Split	Ukuran 1 - 2 cm	m ³
		Ukuran 2 - 3 cm	m ³
		Ukuran 3 - 4 cm	m ³
		Lainnya	m ³
6	Seng Gelombang	Ukuran (0,02 x 90 x 180) cm	lembar
		Ukuran (0,03 x 90 x 180) cm	lembar
		Lainnya	lembar
7	Paku	Paku Kayu 2"- 6"	kg
		Paku Beton	kg
		Paku Seng	kg
		Paku Triplek	kg
		Lainnya	kg
8	Batu Alam	Batu alam keras	m ²
		Batu alam lunak	m ²
		Lainnya	m ²
9	Semen Portland	Semen Portland type I (SNI. 15-2049-2004)	zak=....kg
		Semen Portland type II (SNI. 15-2049-2004)	zak=....kg

RESPONDEN PEDAGANG GROSIR			
No	Jenis Barang	Kualitas Barang	Satuan/ Unit
(1)	(2)	(4)	(5)
		Semen Portland type III (SNI. 15-2049-2004)	zak=....kg
		Semen Portland type IV (SNI. 15-2049-2004)	zak=....kg
		Semen Portland type V(SNI. 15-2049-2004)	zak=....kg
		Super Masonary Cement(SMC) (SNI 15-3500-2004)	zak=....kg
		Portland Composite Cement(PCC) (SNI 15-7064-2004)	zak=....kg
		Portland Pozzoland Cement (PPC) (SNI 15-0302-2004)	zak=....kg
		Lainnya	zak=....kg
		Lainnya	zak=....kg
10	Besi Beton (Full) SNI 07-2052-2002	Besi beton polos (BJTP 24) ukuran d=6mm , p=12m	batang
		Besi beton polos (BJTP 24) ukuran d=8mm , p=12m	batang
		Besi beton polos (BJTP 24) ukuran d=10mm , p=12m	batang
		Besi beton ulir (BJTS 32) ukuran d=10mm , p=12m	batang
		Besi beton ulir (BJTS 32) ukuran d=16mm , p=12m	batang
		Besi beton ulir (BJTS 40) ukuran d=10mm , p=12m	batang
		Besi beton ulir (BJTS 40) ukuran d=16mm , p=12m	batang
		Besi beton canal (shape)	batang
		Lainnya	batang
		Lainnya	batang
11	Bak Mandi Fiber	Ukuran 55 x 55 x 60 cm	buah
		Ukuran 60 x 60 x 60 cm	buah
		Lainnya	buah
		Lainnya	buah
12	Kloset	Kloset duduk	buah
		Kloset jongkok	buah
		Lainnya	buah
13	Seng Plat	Seng plat BJLS 20 L=45	m
		Seng plat BJLS 20 L=60	m
		Seng plat BJLS 25 L=45	m
		Seng plat BJLS 25 L=60	m

RESPONDEN PEDAGANG GROSIR			
No	Jenis Barang	Kualitas Barang	Satuan/ Unit
(1)	(2)	(4)	(5)
		Seng plat BJLS 30 L=45	m
		Seng plat BJLS 30 L=60	m
		Lainnya	m
14	Pipa PVC	AW Φ 1/2" panjang 4 m	batang
		AW Φ 3/4" panjang 4 m	batang
		AW Φ 1" panjang 4 m	batang
		AW Φ 2" panjang 4 m	batang
		AW Φ 3" panjang 4 m	batang
		AW Φ 4" panjang 4 m	batang
		D Φ 2 1/2" panjang 4 m	batang
		D Φ 3" panjang 4 m	batang
		D Φ 4" panjang 4 m	batang
		C Φ 5/8" panjang 4 m	batang
		C Φ 2" panjang 4 m	batang
		C Φ 3" panjang 4 m	batang
		C Φ 4" panjang 4 m	batang
		Lainnya kw AW	batang
		Lainnya kw D	batang
		Lainnya kw C	batang
15	Kayu Balok	Kayu kelas I	m ³
		Kayu kelas II	m ³
		Kayu kelas III	m ³
		Kayu kelas IV	m ³
		Kayu kelas V	m ³
		Lainnya	m ³
16	Kayu Papan	Kayu kelas I	m ³
		Kayu kelas II	m ³
		Kayu kelas III	m ³
		Kayu kelas IV	m ³
		Kayu kelas V	m ³

RESPONDEN PEDAGANG GROSIR			
No	Jenis Barang	Kualitas Barang	Satuan/ Unit
(1)	(2)	(4)	(5)
		Lainnya	m ³
		Lainnya	m ³
17	Kayu Lapis/Triplek	Triplek 3mm	lembar
		Triplek 4mm	lembar
		Triplek 6mm	lembar
		Triplek/ Plywood 9mm	lembar
		Triplek/ Plywood 12mm	lembar
		Lainnya	lembar
		Lainnya	lembar
18	Cat Emulsi	Cat Tembok eksterior (Harga)	25 kg
		Cat Tembok eksterior (merk)	
		Cat Tembok Interior (Harga)	25 kg
		Cat Tembok Interior (Merk)	
		Cat Atap (Harga)	25 kg
		Cat Atap (Merk)	
19	Cat Minyak	Cat Besi/Kayu (Harga)	kg
		Cat Besi/Kayu (Merk)	
		Cat Meni Besi/Kayu (Harga)	kg
		Cat Meni Besi/Kayu (Merk)	
		Lainnya	kg
20	Tegel/Keramik	Tegel plint pc abu-abu uk. 10x40 cm (Harga)	m ²
		Tegel plint pc abu-abu uk. 10x40 cm (Merk)	
		Tegel keramik uk. 30x30 cm (Harga)	m ²
		Tegel keramik uk. 30x30 cm (Merk)	
		Tegel keramik uk. 33x33 cm (Harga)	m ²
		Tegel keramik uk. 33x33 cm (Merk)	
		Tegel keramik uk. 40x40cm (Harga)	m ²
		Tegel keramik uk. 40x40cm (Merk)	

RESPONDEN PEDAGANG GROSIR			
No	Jenis Barang	Kualitas Barang	Satuan/ Unit
(1)	(2)	(4)	(5)
		Tegel keramik uk. 20x20 cm (Harga)	m ²
		Tegel keramik uk. 20x20 cm (Merk)	
		Tegel keramik uk. 10x20 cm (Harga)	m ²
		Tegel keramik uk. 10x20 cm (Merk)	
		Tegel keramik uk. 20x25 cm (Harga)	m ²
		Tegel keramik uk. 20x25 cm (Merk)	
		Tegel keramik uk. 60x60 cm (Harga)	m ²
		Tegel keramik uk. 60x60 cm (Merk)	
		Tegel keramik uk. 30x30 cm warna/motif (Harga)	m ²
		Tegel keramik uk. 30x30 cm warna/motif (Merk)	
		Tegel keramik uk. 20x20 cm warna/motif (Harga)	m ²
		Tegel keramik uk. 20x20 cm warna/motif (Merk)	
		Tegel keramik uk. 40x40 cm warna/motif (Harga)	m ²
		Tegel keramik uk. 40x40 cm warna/motif (Merk)	
		Lainnya	m ²
21	Genteng/Atap	Genteng tanah liat tradisional	buah
		Genteng tanah liat keramik	buah
		Atap metal	buah
		Atap asbes	buah
		Atap beton	buah
		Lainnya	buah
22	Kaca	Kaca polos bening 3 mm	m ²
		Kaca polos bening 5 mm	m ²
		Kaca polos bening 8 mm	m ²
		Kaca one way	m ²
		Kaca riben	m ²
		Lainnya	m ²
23	Aspal	Curah Grade 60/70 Lokal	ton

RESPONDEN PEDAGANG GROSIR			
No	Jenis Barang	Kualitas Barang	Satuan/Unit
(1)	(2)	(4)	(5)
		Submersible Pump	buah
		Lainnya	buah
28	Rangka Atap Baja	Profil Canal "C" tipe C71.075	batang
		Profil Canal "C" tipe C81.075	batang
		Profil Canal "C" tipe C81.095	batang
		Profil "Omega" / reng tipe AA	batang
		Profil "Omega" / reng tipe A	batang
		Profil "Omega" / reng tipe AB	batang
		Lainnya	batang
29	Batako	Batako berlubang (hollow block)	m3
		Batako tidak berlubang (solid block) ukuran 20x10x40	m3
		Lainnya	m3
30	Aluminium	Profil kusen aluminium 3 inchi	m
		Profil kusen aluminium 4 inchi	m
		Aluminium lembaran 0,5 mm panjang 2 m, lebar 1 m	lembar
		Aluminium lembaran 1 mm panjang 2 m, lebar 1 m	lembar
		Lainnya	m
31	Tangki Air Fiber	Ukuran 450 liter	buah
		Ukuran 550 liter	buah
		Ukuran 1000 liter	buah
		Ukuran 2000 liter	buah
		Lainnya	buah
32	Lampu	Lampu pijar 25 W	buah
		Lampu pijar 40 W	buah
		Lampu TL 18 W	buah
		Lampu TL 20 W	buah
		Lampu TL 40 W	buah

RESPONDEN PEDAGANG GROSIR			
No	Jenis Barang	Kualitas Barang	Satuan/ Unit
(1)	(2)	(4)	(5)
		Lainnya	buah
33	MCB (SPLN 108- 1993)	1 phasa	buah
		2 phasa	buah
		3 phasa	buah
		Lainnya	buah

<http://acehbaratkab.bps.go.id>
<http://acehbaratkab.bps.go.id>

Lampiran 2**Nilai Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Provinsi di Indonesia Tahun 2014**

IKK 2014			
No	Kode	PROVINSI	IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1100	PROV. ACEH	93,54
2	1200	PROV. SUMATERA UTARA	96,08
3	1300	PROV. SUMATERA BARAT	92,90
4	1400	PROV. RIAU	102,89
5	1500	PROV. JAMBI	94,90
6	1600	PROV. SUMATERA SELATAN	98,80
7	1700	PROV. BENGKULU	96,21
8	1800	PROV. LAMPUNG	91,87
9	1900	PROV. KEP. BANGKA BELITUNG	102,09
10	2100	PROV. KEPULAUAN RIAU	107,34
11	3100	PROV. DKI JAKARTA	97,13
12	3200	PROV. JAWA BARAT	88,05
13	3300	PROV. JAWA TENGAH	83,00
14	3400	PROV. DI YOGYAKARTA	84,81
15	3500	PROV. JAWA TIMUR	87,62
16	3600	PROV. BANTEN	89,19
17	5100	PROV. BALI	91,67
18	5200	PROV. NUSA TENGGARA BARAT	81,00
19	5300	PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	89,31
20	6100	PROV. KALIMANTAN BARAT	109,46
21	6200	PROV. KALIMANTAN TENGAH	103,23
22	6300	PROV. KALIMANTAN SELATAN	99,18
23	6400	PROV. KALIMANTAN TIMUR	100,00
24	6500	PROV. KALIMANTAN UTARA	109,86
25	7100	PROV. SULAWESI UTARA	102,10
26	7200	PROV. SULAWESI TENGAH	86,62
27	7300	PROV. SULAWESI SELATAN	88,55
28	7400	PROV. SULAWESI TENGGARA	99,67
29	7500	PROV. GORONTALO	93,62
30	7600	PROV. SULAWESI BARAT	94,79
31	8100	PROV. MALUKU	104,43
32	8200	PROV. MAULUKU UTARA	117,89
33	9100	PROV. PAPUA BARAT	125,79
34	9400	PROV. PAPUA	191,86

Sumber: BPS RI

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://acehbaratkab.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN ACEH BARAT

JL. SISINGAMANGARAJA NO. 2 MEULABOH
TELP (0655) 7009023
E-mail : bps1107@bps.go.id
Homepage : <http://acehbaratkab.bps.go.id>